BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang memerlukan keadaan ekonomi yang stabil yang akan membantu dan memperlancar usaha pemerintah dalam mengadakan perhitungan perencanaan pembangunan. Untuk mencapai keadaan ekonomi yang stabil perlu diusahakan suatu kondisi moneter yang mantap. Kondisi tersebut tercapai apabila ditunjang oleh sistem perindustrian, perdagangan ekspor dan impor baik migas maupun non migas, pertambangan, pariwisata serta perbankan yang sehat dan sempurna.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dmaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*Surplus of Fund*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*Lock Of Fund*), dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.

Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 6 menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-undang tersebut telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam UU No.10

tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 antara lain disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Hal ini menggambarkan bahwa perbankan, khususnya Bank umum, merupakan inti dari sistem keuangan dimana Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah atau swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dananya. Aktivitas pemberian kredit yang dilakukan Bank merupakan pelaksanaan dari fungsi penyaluran dana kepada masyarakat.

Bank merupakan pemasok bagi sebagian uang yang beredar yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan. Hal inilah yang menggambarkan bahwa Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam melakukan kegiatan perekonomian maupun perdagangan.

Bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan (kredit) dan jasa-jasa tersebut. Untuk itu Bank memperoleh bunga, komisi atau provisi dari pemberian kredit dan penjualan jasa itu. Dengan demikian Bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah sesuai dengan kegiatan utama Bank itu sendiri yaitu dengan cara menghimpun dana, menyalurkan dana dan menghimpun jasa-jasa Bank lainnya (Kasmir,2007).

Kredit mempunyai kedudukan yang istimewa, terutama pada negara yang sedang berkembang sebab antara *volume* permintaan akan dana jauh lebih besar

dari penawaran dana yang ada di masyarakat selain itu pendapatan bunga dari kredit merupakan komponen yang dominan dibandingkan dengan jasa-jasa perbankan lainnya.

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Irham Fahmi, 2010).

Dalam menyalurkan dana dari masyarakat tersebut, sejalan dengan peraturan tentang perbankan. Sebelum memberikan kredit Bank wajib melaksanakan prinsip atau analisis kredit agar kredit yang diberikan dapat efektif. Analisis tersebut yakni 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Coleteral, dan Condition*. (Irham Fahmi, 2010). Dalam menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit dapat memberikan gambaran mengenai keadaan debitur. Hanya debitur yang layak, dalam arti ia mempunyai kepribadian yang baik, mampu melunasi kredit, mempunyai modal dalam menjalankan usahanya, situasi ekonomi yang mendukung dan mempunyai jaminan sajalah maka kredit tersebut akan diberikan. Selain itu, penerapan atau penggunaan prinsip-prinsip pemberian kredit juga diharapkan dapat mencegah atau meminimalkan resiko kredit macet yang pada akhirnya akan mengakibatkan kredit bermasalah dan merugikan pihak Bank itu sendiri.

Dalam uraian diatas dapat kita ketahui bahwa kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal memberikan sumbangan pendapatan yang cukup

besar bagi Bank, namun kredit merupakan kegiatan dan jasa Bank yang penuh dengan resiko yang dapat mengakibatkan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan.*

Seperti femomena yang terjadi akhir-akhir ini bahwa perbankan nasional masih harus bekerja keras. Apalagi, ancaman *Non Performing Loan* (NPL) bukan lagi isu. Catatan Bank Indonesia (BI) telah menunjukan bahwa hingga akhir Desember 2008, posisi NPL terus merambat naik dibandingkan dengan posisi September 2008. Memasuki 2009, penguatan perbankan dan NPL tampaknya bakal jadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Kendati kondisi perbankan secara umum masih aman, Biro Riset InfoBank mencatat bahwa September 2008 dari 125 Bank, 16 Bank NPL-nya sudah diatas 5%. Pengelola Bank tentunya harus ekstra hati-hati. Pasalnya, kalau diabaikan hal ini justru berpotensi memicu krisis. Karena itu tidak berlebihan jika Bank mendapatkan pengawasan. (http://www.perbanas.com,2009). Seperti di jelaskan dalam peraturan Bank Indonesia pada Pasal 2 ayat 2 bahwa bank yang dinilai memiliki kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya salah satunya yaitu memiliki kredit bermasalah (*non-performing loan*) secara neto lebih dari 5% (www.bi.go.id). Apabila 16 bank yang NPL-nya diatas 5% tersebut tidak mendapatkan pengawasan secara intensif maka hal ini tentu dapat menyebabkan krisis.

Melihat fenomena tersebut apakah hal ini terjadi karena semakin besarnya pemberian kredit yang tergolong macet atau pertumbuhan penyaluran kredit yang

relatif rendah ataukah sistem dan prosedur perbankan kurang memadai untuk memantau atau mengawasi pemberian kredit.

Untuk itu seiring dengan meningkatnya penyaluran atau pemberian kredit dan banyaknya kredit bermasalah. Maka pihak Bank perlu melakukan pemeriksaan (audit) terhadap aktivitas kegiatan perusahaan. Audit manajemen muncul dengan berkembangnya Audit Keuangan, dalam hal ini yang dinilai bukan hanya aspek keuangan namun juga aspek yang bersifat non keuangan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi program dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Program ataupun aktifitas perusahaan dalam hal ini adalah pemberian kredit.

Audit manajemen merupakan salah satu alat yang digunakan manajemen untuk mengukur dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif, efisien, dan ekonomis (IBK. Bayangkara,2008). Dalam arti luas audit manajemen merupakan suatu proses evaluasi secara sistematis dan efektivitas organisasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan di bawah pengendalian manajemen dan membuat laporan-laporan mengenai hasil dari evaluasi tersebut serta merekomendasikan saran-saran untuk perbaikan. Menurut (Alvin A Arens,2006) Efektivitas merujuk ke pencapaian tujuan sedangkan efisiensi mengacu ke sumber daya yang digunakan.

Adapun beberapa tahapan dalam audit manajemen menurut (IBK Bayangkara,2008) antara lain : Audit Pendahuluan, Review dan Pengujian

Pengendalian Manajemen, Audit Terperinci, Pelaporan dan Tindak Lanjut. Dengan adanya audit manajemen diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya resiko pengembalian kredit. Oleh karena itu audit manajemen sangat diperukan agar pemberian kredit dapat efektif.

Seperti pada lembaga keuangan lainnya PT. BTPN KCP Burangrang Bandung juga merupakan salah satu lembaga yang bergerak di sektor perbankan yang memberikan fasilitas perbankan diantaranya dalam bentuk simpanan, kredit dan jasa lainnya. Dalam hal ini PT. BTPN lebih menekankan kegiatan usahanya pada bidang kredit khususnya kredit pensiun karena PT. BTPN merupakan lembaga keuangan yang lebih spesifik melayani para pensiunan baik dari BUMN, PNS, Anggota TNI/Polri.

Dalam penyaluran kredit PT. BTPN mengalami permasalahan yaitu pada tahun 2008 terjadi pengembalian kredit yang bermasalah yang mencapai angka 1,71%. Walaupun dalam peraturan Bank Indonesia (BI) menetapkan tingkat NPL sebesar 5% namun angka tersebut sudah termasuk kredit bermasalah karena PT. BTPN menetapkan tingkat NPL yaitu sebesar 0,5%. (Kebijakan Direktur Utama PT. BTPN melalui media komunikasi internal,2008). Bila hal ini dibiarkan maka kerugian Bank akan semakin besar.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit PT. BTPN juga menghadapi permasalahan pada proses analisa kredit antara lain : ditemukan adanya SKEP palsu yang dibuat oleh oknum nasabah. Hal tersebut dapat menyebabkan kolektibilitas kredit dikarenakan nasabah yang bersangkutan bukan nasabah PT. BTPN tujuannya hanya untuk dapat meminjam dana tanpa adanya pengembalian

dana. Permasalahan lain yaitu pembayaran cicilan kredit biasanya dipotong langsung oleh pihak Bank dari gaji nasabah itu sendiri, namun adapula nasabah yang gajinya turun atau minus. Sebagai contoh seorang nasabah mempunyai gaji sebesar 700.000 dan pihak Bank memotong cicilan kredit tiap bulan sebesar 600.000. suatu ketika gaji nasabah tersebut turun menjadi 500.000 dan pada akhirnya nasabah tidak mampu mengembalikan cicilian kredit. Dengan demikian maka pihak Bank tidak bisa memotong cicilian kredit karena dana yang ada tidak mencukupi. adapula nasabah yang tidak mampu membayar cicilan dikarenakan usaha yang dijalani nasabah mengalami kerugian. Permasalahan lain yaitu nasabah melakukan pinjaman ganda yang pada akhirnya nasabah tersebut tidak dapat melakukan pembayaran secara tepat waktu dan bahkan tidak dapat membayar cicilan dikarenakan harus membayar lebih besar karena melakukan pinjaman ganda tersebut Hal ini dapat mengakibatkan kolektabilitas kredit yang pada akhirnya dapat merugikan pihak Bank itu sendiri. (Rina Rosalina, *Credit Acceptance*).

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan audit antara lain pada proses audit pendahuluan, seharusnya auditor memeriksa data-data atau objek yang harus diaudit, namun data yang diminta sulit untuk diberikan dikarenakan pada bagian yang akan diaudit, data yang akan diberikan harus menunggu keputusan atasan, terkadang data yang akan diberikan sering ditunda-tunda dan takut diketahui adanya permasalahan. (Dewi Kania, *Reporting Audit*).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "**Analisis Peranan Audit Manajemen dalam meningkatkan efektivitas Pemberian Kredit**."

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Biro Riset InfoBank mencatat bahwa September 2008 dari 125 Bank, 16 Bank NPL-nya sudah diatas 5%.
2. Pada tahun 2008 terjadi pengembalian kredit yang bermasalah yang mencapai angka 1,71%. angka tersebut sudah termasuk kredit bermasalah karena PT. BTPN menetapkan tingkat NPL yaitu sebesar 0,5%.
3. Ditemukan adanya SKEP palsu yang dibuat oleh oknum nasabah.
4. Nasabah tidak mampu mengembalikan cicilian kredit dikarenakan gaji nasabah mengalami penurunan atau minus. Adapula nasabah yang tidak mampu mengembalikan cicilan kredit dikarenakan usaha yang dijalaninya mengalami kerugian.
5. Adanya nasabah yang melakukan pinjaman ganda sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan kredit tepat waktu dan bahkan tidak dapat mengembalikan cicilan kredit tersebut..

6. Data yang diminta auditor sulit untuk diberikan oleh pihak yang akan diaudit. sedangkan data tersebut merupakan objek yang harus diaudit. Ini dikarenakan data yang akan diberikan harus menunggu keputusan atasan, terkadang data sering ditunda-tunda dll.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dalam latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Audit manajemen pada PT. BTPN KCP Burangrang Bandung
2. Bagaimana pelaksanaan Pemberian kredit pada PT. BTPN KCP Burangrang Bandung
3. Bagaimana peranan Audit manajemen dalam meningkatkan efektivitas Pemberian kredit pada PT. BTPN KCP Burangrang Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasi diatas, maka penelitian dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data, menganalisis dan memperoleh pemahaman mengenai Audit manajemen dan Pemberian kredit yang ada pada PT. BTPN KCP Burangrang Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Audit manajemen pada PT. BTPN KCP Burangrang Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemberian kredit pada PT. BTPN KCP Burangrang Bandung.
3. Untuk mengetahui peranan Audit manajemen dalam meningkatkan efektivitas Pemberian kredit pada PT. BTPN KCP Burangrang Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

a. Bagi Peneliti

   Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis peranan audit manajemen dalam efektivitas pemberian kredit. Serta sebagai uji kemampuan peneliti dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dengan penelitian di lapangan.

b. Bagi Program Studi Akuntansi

   Dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mengembangkan ilmu akuntansi yaitu dengan memberikan referensi tentang keterkaitan audit manajemen dengan pemberian kredit.

c. Bagi Pihak Lain

   Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian di bidang yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perusahaan yang diteliti dan menjadi memberi masukan mengenai Audit manajemen dan peranannya dalam meningkatkan efektivitas Pemberian kredit pada PT. BTPN KCP Burangrang Bandung di masa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan Penelitian dan pengumpulan data pada PT. BTPN KCP Burangrang Bandung yang beralamat di Jl Burangrang No. 26 Bandung. Telp (022)7322865, Fax (022)7333893.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis gunakan yaitu mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan :					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	2. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■					
	3. Menentukan tempat penelitian	■					
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi	■					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan	■					
	3. Penelitian di perusahaan		■	■			
	4. Sidang Usulan Penelitian			■			
	5. Penyusunan skripsi				■	■	

III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft skripsi						
	2. Sidang akhir skripsi						
	3. Penyempurnaan laporan skripsi						
	4. Penggandaan skripsi						